

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Gerakan Sosial

Teori gerakan sosial adalah suatu bentuk aksi yang dilakukan bersama dengan tujuan untuk suatu penolakan maupun tuntutan dari masyarakat, baik yang terorganisir secara rapi ataupun secara cair dan informal. Gerakan sosial merupakan suatu gerakan yang di dalamnya dilakukan oleh masyarakat maupun kelompok tertentu secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang diinginkan, atau dengan kata lain gerakan sosial adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai keinginan yang menjadi tujuan bersama. Secara teoritis gerakan sosial adalah suatu gerakan yang terbangun atas keinginan masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan-tuntutan atas perubahan dalam kebijakan maupun institusi pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.¹

Pada hakikatnya gerakan sosial merupakan hasil dari perilaku kolektif, yaitu suatu perilaku yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang yang sifatnya tidak rutin dan perilaku mereka merupakan hasil dari respon ataupun tanggapan terhadap peristiwa tertentu. Namun, gerakan sosial berbeda dengan perilaku kolektif. Perilaku kolektif lebih bersifat spontan sedangkan gerakan sosial sifatnya lebih terorganisasi dan lebih memiliki kepentingan dan tujuan bersama. Gerakan sosial juga memiliki beberapa bentuk atau klasifikasi. Klasifikasi tersebut berdasarkan dari beberapa kriteria yaitu, menurut bidang perubahan yang diinginkan, kualitas perubahan yang ingin dicapai, arah perubahan, target perubahan, strategi yang mendasari (logika atas gerakan) dan yang terakhir adalah sejarah perkembangannya.²

Yang menjadi dasar pedoman teori yang mendukung adanya aksi gerakan sosial dalam melihat kemunculan gerakan penolakan oleh masyarakat petani Desa Tulakan terhadap aktivitas pertambangan di Sungai Gelis dengan merujuk pada empat faktor dari pemikiran Sidney Tarrow yaitu: tantangan kolektif, tujuan

¹ Opat et al., "Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Penolakan Pertambangan Galian C Di Kali Noemuti (Studi Kasus Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara)." 2022. 34.

² Atang, "Gerakan Sosial Berbasis Budaya (Studi Tentang Gerakan Sosial Melawan Investasi Tambang Di Kabupaten Lembata)." 2013. 10-11.

bersama, solidaritas dan identitas kolektif serta yang terakhir memelihara politik perlawanan.

1) Tantangan Kolektif *Collective Challenge*

Tantangan kolektif seringkali ditandai dengan adanya aksi atau tindakan mengganggu, menghalangi, ataupun membuat ketidakpastian terhadap aktivitas kegiatan orang lain. Tantangan kolektif biasanya disimbolisasikan dengan cara yang reprefif seperti menggunakan slogan, corak pakaian, music, aatau penamaan objek-objek yang familiar yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menghalaangi atau mengganggu si subjek. Secara umum tantangan kolektif dikatakan sebagai karakteristik dari gerakan sosial itu sendiri.

Dalam konstituen baru menegaskan bahwa penentangan *contention* mungkin hanya satu-satunya sumberdaya gerakan yang bisa dikuasai oleh para penentang. Oleh karena itu, gerakan menggunakan tantangan kolektif menjadi titik fokus bagi para pendukung untuk mendapatkan perhatian dari kubu yang dilawan, pihak ketiga dan menciptakan konstituen untuk diwakilkan. Tantangan kolektif dari masyarakat Desa Tulakan terhadap usaha pertambangan disini adalah melakukan aksi spontan ataupun tindakan protes serta menghalangi dan mengganggu aktivitas-aktivitas para penambang agar pertambangan tersebut berhenti beroperasi.³

2) Tujuan Bersama

Ada banyak alasan yang dapat dikemukakan terkait dengan mengapa orang bergabung dalam aksi gerakan sosial, dari sekedar keinginan mencemooh otoritas hingga insting hanya ikut-ikutan yang tidak jelas tujuannya. Akan tetapi, ada alasan yang paling rasional mengapa seseorang terikat bersama dalam aksi gerakan sosial adalah untuk melakukan tuntutan-tuntutan bersama untuk menentang para pemegang otoritas, pihak lawan maupun para elit. Tidak semua konflik muncul dari kepentingan kelas, akan tetapi lahir dari nilai-nilai kepentingan bersama yang merupakan dasar dari tindakan-tindakan bersama.

Kaitannya dengan tujuan bersama dari masyarakat petani Desa Tulakan untuk menentang adanya pertambangan galian C ini agar masyarakat bisa bersama-sama melakukan aksi penolakan pertambangan di Sungai Gelis. Adanya kegiatan

³ Bagus Haryono Adi Rahman, Yulius Slamet, "Dinamika Gerakan Sosial Masyarakat Samarinda Dalam Memperjuangkan Keadilan Lingkungan (Studi Kasus Pada Gerakan Samarinda Menggugat Di Kalimantan Timur)," *Jurnal Analisa Sosiologi* 7, no. April (2018). 2018. 5.

pertambangan ini menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi para petani berupa rusaknya saluran irigasi persawahan. Adanya tujuan bersama dari para petani untuk melakukan tindakan penolakan pertambangan di Sungai Gelis ini karena masyarakat Desa Tulakan mayoritas adalah petani dan masyarakat merasa bahwa dengan adanya pertambangan tersebut sangat merusak lingkungan, serta merugikan petani berupa rusaknya saluran irigasi. Aksi dari masyarakat petani merupakan aksi nyata dan dilakukan secara bersama-sama untuk mengatasi masalah yang dialami terkait dengan adanya pertambangan di Sungai Gelis Desa Tulakan.⁴

3) Solidaritas dan Identitas Kolektif

Ada sesuatu yang dapat menggerakkan secara bersama-sama atau sering kita sebut sebagai *common denominator* dari gerakan sosial ini adalah adanya pertimbangan partisipan terhadap kepentingan bersama sehingga kemudian dapat memisahkan dari sekedar hanya potensi gerakan menjadi gerakan aksi nyata. Dengan cara menggerakkan konsensus, perancang bisa memainkan peran yang sangat penting untuk memunculkan rangsangan gerakan. Akan tetapi para pemimpin hanya bisa menciptakan sebuah gerakan sosial jika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan identitas dan solidaritas, yang hal tersebut bersumber dari etnisitas, nasionalisme dan keyakinan agama.

Ada sesuatu hal yang menggerakkan aksi ini secara bersama-sama. Artinya gerakan tersebut atas dasar kepentingan masyarakat untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada, serta bersama-sama melakukan aksi gerakan penolakan terhadap pertambangan di Sungai Gelis. Dengan adanya rasa solidaritas dan identitas kolektif, masyarakat satu dengan yang lainnya mempunyai rasa keterikatan sehingga masyarakat melakukan penolakan terhadap pertambangan yang dinilai mempunyai dampak buruk bagi para petani. Dari masalah pertambangan tersebut masyarakat muncul rasa kecewa dan mempunyai inisiatif untuk bersama-sama menolak adanya eksploitasi tambang galian C yang berupa pasir dan batu di Sungai Gelis. Bukan hanya itu saja sebelum melakukan aksi masyarakat berkumpul di tempat pertemuan bersama dengan didampingi beberapa kordinator untuk membahas rencana aksi penolakan

⁴ Opat et al., "Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Penolakan Pertambangan Galian C Di Kali Noemuti (Studi Kasus Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara)." vol 11.no 1. 2022. 6

pertambangan sebelum menuju ke tempat pertambangan galian C tersebut.⁵

4) Memelihara Politik Perlawanan

Hanya dengan memelihara aksi kolektif melawan pihak lawan, suatu perlawanan dapat menjadi sebuah gerakan sosial. Identitas bersama, tujuan kolektif dan tantangan dapat diidentifikasi dapat membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan tersebut. Sebaliknya, ketika mereka tidak bisa memelihara tantangan bersama, ini akan mengakibatkan gerakan mereka menjadi semacam kemarahan individu atau kebencian bahkan mungkin juga bisa menarik diri ke dalam isolasi. Melihat hal tersebut, memelihara aksi kolektif dalam intraksi dengan pihak lawan yang kuat menandai proses pergeseran yang sebelumnya sebuah penentangan berubah menjadi suatu gerakan sosial. Dengan demikian, gerakan sosial merupakan gerakan terorganisir yang memiliki visi dan misi khusus dalam setiap aksinya dan pastinya juga mempunyai strategi yang sudah terencana sebelumnya. Gerakan sosial cenderung bertahan lama dan bahkan bisa berlangsung sampai kurun waktu yang bertahun-tahun.

Memelihara politik perlawanan disini masyarakat melakukan aksi penolakan untuk menuntut atau menentang para pemilik tambang agar segera menutup pertambangan di area persawahan Sungai Gelis. Sejauh ini belum ada sikap pertanggungjawaban dari pihak penambang terkait dengan masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat yaitu berupa rusaknya area persawahan bekas pertambangan. Sikap pemerintah yang juga kurang tegas dalam menyikapi adanya pertambangan ini mengakibatkan para penambang sering kali mencuri kesempatan untuk melakukan proses penambangan. maka dari itu masyarakat kecewa terhadap pihak penambang maupun pemerintah, sehingga memunculkan aksi gerakan sosial untuk menuntut pertambangan agar segera dihentikan. Gerakan aksi penolakan tersebut berupa demonstrasi di lokasi pertambangan dan juga di kantor balai desa Tulakan.⁶

⁵ Trisnia Anjani, "Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi," *Jom Fisip* 5, no. 1 (2018): 1–15.

⁶ Sudarno, "Puluhan Petani Tulakan Jepara Bongkar Jembatan Penambangan Batu Ilegal." 2022. di akses pada hari Rabu, 1 Maret 2023 pukul 19.00. <https://www.liputan6.com/regional/read/4854807/puluhan-petani-tulakan-jepara-bongkar-jembatan-penambangan-batu-ilegal>.

a. Konflik

Secara etimologis kata “konflik” berasal dari bahasa latin *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti tabrakan atau benturan. Dengan demikian “konflik” dalam kehidupan sosial dapat diartikan sebagai benturan kepentingan, pendapat, atau keinginan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Secara sederhana konflik juga diartikan sebagai perselisihan atau persengketaan antara dua atau lebih kekuatan baik secara kelompok atau individu dimana kedua belah pihak tersebut memiliki keinginan untuk saling menyingkirkan atau bahkan menjatuhkan. Dalam hubungan bermasyarakat pasti akan mengalami konflik baik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang seiring dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.⁷

Konflik menurut Kartono dan Gulo diartikan sebagai ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan orang lain. Keadaan mental merupakan hasrat-hasrat, keinginan-keinginan dan lain sebagainya yang saling bertentangan, tapi bekerja pada saat yang bersamaan. Konflik sering kali diberi pengertian sebagai suatu bentuk pertentangan atau perbedaan ide, pendapat, kepentingan dan faham antara dua pihak atau lebih. Sebuah konflik kepentingan hanya bisa ada jika seseorang mempunyai sikap ketidakberpihakan dan ketidakpercayaan.

David E. Apter mengemukakan bahwa sumber konflik terdapat tiga macam yaitu ideologi, kepentingan (kekuasaan dan ekonomi) dan nilai. Semakin banyak sumber konflik yang menjadi penyebab, maka konflik juga akan sangat sulit bahkan butuh waktu yang lama untuk diselesaikan. Sumber konflik menurut Karl Mark berasal dari kesenjangan sosial dalam masyarakat, selama masih ada kesenjangan ekonomi dalam masyarakat maka akan selalu ada konflik. Pelaku konflik sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu pelaku individu dan kelompok (perjuangan sosial kultural dan ekonomi), yang di dalamnya terdapat bentuk konflik yakni konflik vertikal antara penguasa dan rakyat serta konflik horizontal yaitu sesama rakyat.⁸

⁷ Andri Wahyudi, “Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan,” *Jurnal Publiciana* 8, no. 1 (2015). 9.

⁸ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi Dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). 27-28.

Konflik yang terjadi akibat adanya pertambangan galian C di Desa Tulakan sendiri sudah tercatat sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 dan 7 Januari 2022. Dimana para petani Desa Tulakan melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut agar bertambangan tersebut berhenti beroperasi. Adu argumentasi sering kali terjadi antara pihak petani dan penambang mengenai persoalan galian C tersebut. Pihak petani mengemukakan adanya pertambangan galian C dikarenakan dampak yang terjadi akibat adanya pertambangan tersebut sangat membahayakan saluran irigasi yang menjadi sumber utama para petani untuk mengairkan air ke sawahnya. Jika terus menerus ditambang akibatnya saluran irigasi tersebut akan longsor. Padahal 200 hektar sawah dan sekitar 60 petani menggantungkan air dari saluran irigasi untuk mengairi persawahannya.

Menyikapi adanya aksi gerakan sosial tersebut pemerintah Desa Tulakan melakukan perundingan antara pihak penambang dan petani. Akhirnya setelah mempertemukan kedua belah pihak pemerintah mengambil kebijakan untuk menutup tambang Galian C tersebut dengan alasan dampak negatif akibat tambang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Namun sikap pemerintah yang dirasa kurang tegas sering kali dimanfaatkan pihak penambang untuk kembali lagi melakukan proses pertambangan, dan hal tersebut memicu kemarahan para petani untuk melakukan aksi demonstrasi lagi dengan cara memotong jembatan yang menjadi akses jalan menuju lokasi pertambangan.⁹

b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Lalu definisi lainnya juga mengatakan bahwa “kebijakan publik diartikan sebagai apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau juga tidak dikerjakan”. Lain dari itu, menurut Richard Rose kebijakan publik didefinisikan sebagai, suatu rangkaian panjang dari banyak atau sedikit peristiwa yang saling

⁹ Nazarudin, “Petani Tulakan Jepara Bongkar Jembatan Akses Penambang Ilegal.” 2022. Diakses pada tanggal 23 Februari 2023. Pukul 21.00. <https://jateng.antaranews.com/berita/426461/petani-tulakan-jepara-bongkar-jembatan-akses-penambang-ilegal>.

berhubungan dan mempunyai konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Richard Rose memberikan sebuah catatan bahwa kebijakan publik merupakan pola kegiatan yang di dalamnya bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi.¹⁰

Definisi lain terkait dengan kebijakan publik juga ditawarkan oleh Fredrich yang mengatakan kebijakan public sebagai “serangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang di dalamnya terdapat sebuah hambatan atau kesulitan, lalu kebijakan tersebut diusulkan agar dapat mengatasi permasalahan dan untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. Meskipun maksud dan tujuan dari tindakan pemerintah tidak selalu benar atau mudah untuk dilihat, namun ide bahwa kebijakan haruslah melibatkan perilaku yang memiliki maksud, merupakan suatu bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan haruslah menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dan terjadi dari pada hanya sekedar apa yang diusulkan pada suatu permasalahan.¹¹

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh pejabat atau badan pemerintah. Oleh karena itu, menurut David Easton karakteristik dari kebijakan public adalah setiap keputusan politik dirumuskan oleh apa yang disebut sebagai otoritas, dalam sistem politik yaitu eksekutif, legislatif, para hakim, penasehat, administrator dan sebagainya. David Easton mengatakan bahwa mereka yang mempunyai otoritas dalam sistem politik dapat memformulasikan kebijakan public dan orang-orang yang terlibat di dalamnya mempunyai tanggung jawab dalam suatu permasalahan tertentu, dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan yang kelak keputusan tersebut diterima serta mengikat sebagian besar anggota individu atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu.¹²

¹⁰ Aril La Yaw, “Konsep Dasar Kebijakan Publik,” *Atmospheric Environment* 42, no. 13 (2008): 2934–2947.

¹¹ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2010). 23.

¹² Simon Fisher, *Mengelola Konflik, Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council, 2018). 29.

1. Karakteristik kebijakan publik

Kaitannya dengan definisi-definisi kebijakan publik di atas dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu kebijakan. *Pertama*, pada dasarnya kebijakan public perhatiannya ditujukan pada suatu tindakan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dari pada perilaku yang sering berubah. *Kedua*, kebijakan pada umumnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pemegang otoritas dalam hal ini adalah pemerintah untuk mengambil keputusan agar keputusan tersebut tidak terpisah-pisah.

Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu namun juga keputusan berikutnya berhubungan dengan pelaksanaan dan penerapannya. *Ketiga*, kebijakan public merupakan apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur kehidupan bernegara, mulai dari urusan pemerintahan, ekonomi dan perdagangan. *Keempat*, kebijakan public dapat berbentuk negatif maupun positif. Secara negatif, kebijakan public dapat melibatkan suatu keputusan dari pemerintah untuk tidak melakukan atau mengerjakan suatu tindakan, padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan. Lalu secara positif, yaitu kebalikan dari sisi negatif bahwa kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang berguna untuk menangani suatu permasalahan.

Yang terakhir *kelima*, kebijakan publik haruslah berdasarkan pada hukum dan tindakan yang bersifat memerintah. Contoh dalam hal ini adalah kebijakan bahwa masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak bila tidak, masyarakat akan dijatuhi sanksi, denda, atau bahkan hukuman penjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan public yang bersifat memerintah kemungkinan besar memiliki sifat yang memaksa secara sah menurut hukum, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.¹³

¹³ Solikhin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012). 45-46.

2. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang kebijakan tersebut bermuatan unsur politik yang diintervensi oleh berbagai kepentingan. Untuk menggambarkan kerumitan dalam proses implementasi itu dapat dilihat pada pernyataan ilmuwan yang ahli dalam bidang studi kebijakan yaitu Eugene Bardach yang mengatakan bahwa “cukup untuk membuat sebuah kebijakan ataupun program yang kelihatannya bagus di atas selembar kertas”.

Menurut Paul Sabatier dalam bukunya yaitu *Implementation and Public Policy* menyatakan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang berbentuk undang-undang ataupun berupa perintah dan keputusan dari otoritas pemerintah. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi suatu masalah yang ingin diselesaikan atau diatasi, menyebutkan secara tegas maksud dan tujuan yang ingin dicapai lalu menstrukturkan atau mengatur proses implementasi tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu tindakan atau keputusan yang benar dan pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang diinginkan. Keberhasilan sebuah implementasi dapat dilihat atau diukur dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu berhasil atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih ataupun yang diinginkan.

Terkait dengan adanya kegiatan pertambangan galian C di Desa Tulakan dibutuhkan adanya kebijakan dan sikap tegas yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Desa Tulakan. Menindaklanjuti adanya gerakan masyarakat yang menolak pertambangan, sebenarnya pemerintah desa sudah melakukan mediasi antara pihak penambang dan petani, yang mana pemerintah memutuskan untuk menutup pertambangan

¹⁴ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2011). 56-57.

tersebut. Namun, kurangnya sikap tegas pemerintah dan ketidakpatuhan para penambang yang melakukan proses penambangan lagi memicu kemarahan petani yang pada tanggal 7 Januari 2022 melakukan gerakan demonstrasi. Implementasi kebijakan publik yang tegas dari pemerintah diperlukan oleh masyarakat petani agar pertambangan tersebut tidak kembali beroperasi mengingat bahayanya pertambangan tersebut.¹⁵

3. Teori Pertambangan Galian C

Pertambangan adalah suatu aktivitas penggalian, pengambilan dan pengangkutan suatu endapan mineral yang terkandung dalam bumi dengan menggunakan beberapa tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis dengan menggunakan peralatan mekanis yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan, penelitian, dan pengusahaan mineral maupun batubara yang di dalamnya meliputi eksplorasi, penyelidikan umum, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, penjualan dan yang terakhir adalah kegiatan pasca tambang.¹⁶

Menurut Sukandarramudi usaha pertambangan yaitu semua usaha yang dilakukan oleh badan hukum, badan usaha atau perseorangan untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk memanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan menurut pendapat sukandarramudi adalah serangkaian kegiatan dari mempelajari dan mencari mineral bahan tambang yang berguna dan bermanfaat untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (pusat dan daerah).¹⁷

¹⁵ Nazarudin, "Petani Tulakan Jepara Bongkar Jembatan Akses Penambang Ilegal." 2022. Diakses pada tanggal 1 Maret 2022. Pukul 10.00 . <https://jateng.antaranews.com/berita/426461/petani-tulakan-jepara-bongkar-jembatan-akses-penambang-ilegal>.

¹⁶ Margana Wiratma, "Social Mapping Untuk Mengantisipasi Potensi Konflik Di Pertambangan Batubara Kabupaten Kutai Barat, Kaltim," *Humaniora* 1, no. 2 (2010): 760.

¹⁷ Sukandarrumidi, *Bahan - Bahan Galian Industri* (Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 2015). 38.

Mineral sendiri adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang mempunyai sifat fisik dan kimia tertentu dengan susunan kristal teratur yang membentuk batuan baik dalam bentuk padu atau lepas. Sedangkan batubara merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa alami tumbuh-tumbuhan. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa minyak dan gas bumi, biji atau batuan di luar panas bumi, dan air tanah. Pertambangan batubara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi termasuk batuan aspal, gambut serta bitumen padat.¹⁸

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, memproduksi, dan menjual hasil tambang yang diambil dari dalam bumi. Bahan galian sendiri dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:

a. Golongan A

Bahan galian A merupakan bahan galian strategis yang dipergunakan untuk perekonomian negara serta keamanan dan pertahanan negara.

b. Golongan B

Bahan galian B merupakan bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Contohnya yaitu tembaga, besi, perak dan emas.

c. Golongan C

Bahan galian C merupakan bahan yang bukan bahan galian strategis ataupun vital. Contohnya adalah batu, kapur, pasir, marmer dan sepanjang bahan tersebut tidak mengandung unsur mineral.¹⁹

Usaha pertambangan sendiri merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang hakikatnya sektor pertambangan dan energi tersebut mengupayakan sebuah proses pengembangan sumber daya mineral dan batubara yang potensial, yang bisa dimanfaatkan secara optimal dan hemat untuk kemakmuran rakyat.

¹⁸ Adi Rahman, Yulius Slamet, "Dinamika Gerakan Sosial Masyarakat Samarinda Dalam Memperjuangkan Keadilan Lingkungan (Studi Kasus Pada Gerakan Samarinda Menggugat Di Kalimantan Timur)." 23.

¹⁹ Meiriska Febrianti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Industri Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 14, no. 2 (2012): 141–156.

Pengolahan dengan adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah pastinya akan menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan di sekitar lokasi pertambangan. Hal tersebut meliputi:

- a. Pencemaran lingkungan, yaitu masuknya atau dimasukkannya zat, energy, makhluk hidup, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan yang ber dampak pada berubahnya tatanan lingkungan tersebut yang disebabkan oleh ulah manusia atau proses alam. Sehingga kualitas lingkungan tersebut menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Akibat dari adanya pertambangan galian C di Desa Tulakan mengakibatkan air Sungai Gelis yang berada di dekat pertambangan menjadi keruh dan berakibat pada rusaknya tatanan ekosistem air tawar.
- b. Perusakan lingkungan, yaitu dengan adanya kegiatan penambangan secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan perubahan sifat-sifat atau hayati lingkungan yang dampaknya akan mengakibatkan lingkungan itu menjadi kurang berfungsi lagi, salah satunya adalah dengan rusaknya lahan persawahan dan rusaknya saluran irigasi milik para petani. Sumber daya mineral merupakan sumber daya yang sifatnya tidak terbaharui *wasting asset or un renewable*. Oleh karena itu pemanfaatan dan penerapannya diharapkan bisa menjaga keselamatan, kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup mapun masyarakat sekitar pertambangan.²⁰

Manusia sendiri diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengolah alam sebagai sumber kehidupan. Adapun bentuk rezeki yang diperoleh manusia tidak lain berasal dari sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Firman Allah dalam surah Al A'raf (7):56,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *dan janganlan kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

²⁰ Syaribulan Syaribulan and Muhammad Akhir, "Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3, no. 2 (2017): 175–184.

Bumi meliputi segala sesuatu yang ada di dalam maupun yang ada di luar menjadi sumber-sumber ekonomi seperti pertambangan, pertanian, perikanan, peternakan, kawasan industri dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, umat Islam disyariatkan memanfaatkan sumber daya alam seoptimal mungkin. Hubungan manusia dengan alam sekitar menurut Al-Quran dan As-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan ajaran aqidah, yaitu konsep kemakhlukan yang sama-sama tunduk dan patuh kepada sang pencipta yang kemudian diatur dan akan kembali kepadanya. Dalam konsep kemakhlukan ini manusia diberikan amanah dari Allah untuk memperlakukan alam sekitarnya dengan baik.²¹

Teori pertambangan ini dapat menjadi konsep yang bisa diterapkan pada kasus pertambangan yang terjadi di Desa Tulakan. Dimana dalam proses memanfaatkan sumber daya alam yang ada, haruslah memperhatikan unsur-unsur yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan juga memperhatikan unsur masyarakat yang menjadi dampak adanya kegiatan pertambangan, sehingga dalam proses memanfaatkan dan mengotimalkan sumber daya alam yang ada bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Dasar yang berbentuk teori atau temuan dari hasil penelitian sebelumnya adalah hal yang dibutuhkan sebagai acuan atau data pendukung. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji adalah salah satu pendukung yang menurut penulis itu sangat penting sebagai acuan dalam penelitian. Maka dari itu, penulis melakukan langkah-langkah kajian terhadap hasil penelitian yang berupa buku, jurnal, skripsi, ataupun sumber-sumber yang yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya untuk dijadikan sebagai referensi atau acuan pada penelitian ini.

Pertama, Gerakan Sosial Masyarakat dalam Penolakan Pertambangan Galian C di Kali Noemuti (Studi Kasus di Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara). Peneliti Gabriel S. Opat; Frans B.R tahun 2022. Hasil penelitian ini berfokus pada gerakan sosial masyarakat Desa Naiola yang merupakan tindakan atau aksi dari masyarakat untuk melakukan tuntutan penolakan pertambangan galian C di Kali Noemuti dikarenakan beberapa perusahaan belum mempunyai izin pertambangan dan

²¹ Hontong, Purwanto, and Tumiwa, "Konflik Sosial Dalam Aktivitas Tambang Galian C Di Desa Teteli Tiga." *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*. Vol. 5. No. 5. 2016. 15-16.

menimbulkan kerusakan sejumlah persawahan masyarakat Desa Naiola yaitu persawahan Klæ. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta kepustakaan. Serta teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari pemikiran Tarrow tentang teori gerakan sosial.

Kedua, Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian C di Kecamatan Bekinang Seberang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Peneliti Emel Salim tahun 2012. Hasil penelitian ini tentang usaha pertambangan galian C di Kecamatan Bekinang Seberang yang dimulai pada tahun 2005 – 2013 dengan 9 lokasi titik pertambangan. Usaha pertambangan dilakukan karena kekayaan sumber galian C yang dimiliki sangat potensial dan prospek. Tetapi dalam kegiatannya menimbulkan dampak negatif yang berimbas pada kkegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat setempat. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan teknik *Random Sampling*. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan angket, ditambah dengan literature-literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

Ketiga, Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Lingkungan. Peneliti Umi Nurkamidah pada tahun 2020. Hasil penelitian ini berfokus tentang penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nglungger yang mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian lapangan *Field Research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Keempat, Pengaruh Tambang Galian Golongan C terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang. Peneliti Muhammad Risal pada tahun 2015. Hasil penelitian ini tentang pengaruh yang signifikan atau positif dengan adanya tambang galian C yang dilakukan oleh PT. Usaha Pulibu terhadap pendapatan perkapita masyarakat Kecamatan Cendana. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, angket, observasi, dokumentasi, dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan. Data-data yang terkumpul berupa data-data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat diolah menjadi data yang bersifat deskriptif.

Kelima, Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat di Kelurahan Makroman. Peneliti

Samuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja pada tahun 2017. Hasil penelitian tulisan ini menunjukkan bahwa pertambangan batubara berdampak negatif dan positif bagi masyarakat Kelurahan Makroman. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keenam, Gerakan Sosial Kaum Santri Melawan Rencana Penambangan di Paseban. Peneliti M. Khusna Amal pada tahun 2018. Hasil penelitian dalam tulisan ini tentang keterlibatan kaum santri dalam melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah atas eksplorasi terhadap tambang pasir besi di Paseban, Jember, dengan tujuan untuk melawan kebijakan pemerintah yang lebih dinilai memihak pro-modal. Metode penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dan data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan.

Ketujuh, Aktivitas Penggalian Bukit Padas dan Perubahan Sosial Masyarakat Rowosari Tembalang, Semarang 1990-2017. Peneliti Tyas Puspita Hanif pada tahun 2019. Hasil penelitian ini tentang masyarakat Rowosari yang semula memiliki basis mata pencaharian hanya sebagai petani mulai berangsur-angsur berubah menjadi penambang bukit padas galian C Rowosari. Dulu aktifitas pertambangan masih menggunakan alat-alat tradisional namun setelah perkembangan teknologi masyarakat mulai menggunakan alat-alat yang canggih untuk menambang. Akibat adanya penambangan memunculkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Rowosari. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah, dimana mencakup empat langkah yaitu, kritik sumber, heuristik (pengumpulan sumber), interpretasi, dan penulisan sejarah.

Kedelapan, Konflik Sosial dalam Aktivitas Tambang Galian C di Desa Tateli Tiga. Peneliti Refki Hontong, Antonius Purwanto, Juliana Tumiwa pada tahun 2016. Hasil penelitian ini tentang konflik sosial yang terjadi di Desa Tateli Tiga yang diakibatkan oleh penambangan galian C oleh pihak perusahaan, pihak perusahaan mengeruk hutan batu sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 13 orang. Lalu data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan literature-literatur sebagai penguat hasil temuan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama berfokus pada gerakan sosial masyarakat terhadap adanya pertambangan galian C. Namun, tempat terjadinya aksi gerakan sosial dalam penelitian ini berbeda tempat daerahnya. Fokus penelitian terdahulu juga mengkaji tentang gerakan masyarakat terhadap

tambang galian C yang mempunyai dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Selain itu, penelitian ini juga sama-sama berfokus pada gerakan sosial masyarakat dan topik pembahasannya juga sama yaitu gerakan sosial masyarakat untuk menolak adanya pertambangan galian C.

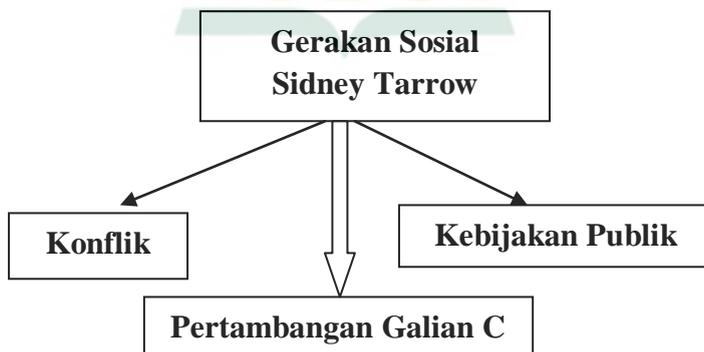
Referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan buku karya Dwi Haryadi yang berjudul Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana buku tersebut diterbitkan oleh UBB Press Bangka Belitung. Dalam buku tersebut banyak sekali membahas mengenai pertambangan, hukum pertambangan, isu-isu pertambangan, serta penegakan hukum terkait dengan permasalahan pertambangan.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu focus penelitian. Fokus penelitian yang peneliti ingin teliti adalah gerakan sosial masyarakat petani terhadap pertambangan galian C dan apa saja dampak positif dan negatif pertambangan galian C yang ada di Desa Tulakan. Adapun adanya perbedaan ini diharapkan dapat pula menimbulkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

C. Kerangka Berfikir

Definisi kerangka berfikir menurut Sugiyono yaitu sebuah gambaran atau model konseptual tentang hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai permasalahan yang sangat penting. Adapun kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



Gambar 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pertambangan golongan galian C di Desa Tulakan memunculkan gerakan sosial masyarakat petani terhadap pertambangan tersebut. Dengan adanya gerakan sosial menimbulkan konflik antara pihak penambang dengan para petani. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa adanya pertambangan galian C di area persawahan Sungai Gelis mengakibatkan dampak yang sangat negatif bagi para petani yaitu, rusaknya saluran irigasi dan area persawahan para petani. Menindaklanjuti adanya konflik tersebut pemerintah Desa Tulakan melakukan mediasi antara pihak petani dan penambang dengan keputusan, bahwa pertambangan galian C tersebut diberhentikan karena keberadaanya yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup para petani.

